

## Sigando Kampung Wisata Religi dan Budaya Sebuah Kajian Relasi Kuasa

Aulia Rahmatika<sup>1)\*</sup>, Afrizal Harun<sup>2)</sup>, Ilham Rifandi<sup>3)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Humanitas Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Indonesia.

<sup>3)</sup> Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

\*Corresponding Author

Email : [auliarahmatika73@gmail.com](mailto:auliarahmatika73@gmail.com)

**How to cite:** Rahmatika, A., Harun, A., & Rifandi, I. (2024). Sigando Kampung Wisata Religi dan Budaya Sebuah Kajian Relasi Kuasa. *In Laboratory Journal*, 2(2): 103-109.

**Article History :** Received: Mar 10, 2024. Revised: Jun 11, 2024. Accepted: Aug 11, 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Relasi Kuasa pada Penetapan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata Budaya dan Religi” membahas relasi kuasa yang terjadi pada penetapan kelurahan sigando sebagai kampung wisata religi dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk konflik atau ketegangan antara kepentingan politik, budaya dan keagamaan dalam proses penetapan tersebut dan menjelaskan adanya hubungan kekuasaan yang diwujudkan dalam penetapan kelurahan sigando sebagai kampung wisata budaya dan religi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hubungan kekuasaan Michael Foucault dan teori konflik Karl Marx. Metode Penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kekuasaan dalam penetapan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata Religi dan Budaya. Relasi kekuasaan ditampilkan dalam bentuk pemaksaan pelabelan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata namun mengindahkan aspek sosial dan keterlibatan masyarakat. Akibat dari hubungan kekuasaan tersebut terjadi konflik di tengah masyarakat.

### KEYWORDS

Sigando  
Kampung Wisata  
Religi  
Budaya  
Relasi Kuasa

This is an open access article under the [CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license



### PENDAHULUAN

Industri pariwisata di Indonesia saat ini dinilai mampu meningkatkan devisa negara selain dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi sektor utama dalam peningkatan perekonomian. Hal ini dikarenakan industri pariwisata merupakan sebuah industri yang selain meningkatkan devisa juga mampu memberi dampak dari segala aspek yang menjadi permasalahan masyarakat, mulai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lain yang berpengaruh kepada masyarakat disampaikan oleh Rohimah (2018:364). Menurut Pendit (2012:69) beberapa jenis pariwisata yang telah dikenal masyarakat, antara lain: a) wisata budaya, yaitu perjalanan yang mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, kebudayaan dan seni mereka, b) wisata komersial, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, c) wisata cagar alam, yaitu jenis wisata ketempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang dan d) wisata religi.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang dikenal memiliki wisata religi di kotanya. Desa atau kampung yang dikiatkan menjadi salah satu kampung wisata budaya dan religi yaitu Kampung Sigando. Kampung ini hadir menawarkan sebuah perjalanan wisata yang bernuansa budaya dan religi karena memiliki potensi wisata dalam bentuk arsitektur mesjid tertua kedua di Sumatra Barat yang sudah diakui sebagai cagar budaya, mesjid yang dimaksud adalah Mesjid Asasi Sigando. Dulunya bernama Surau Gadang berdiri pada tahun 1685. Mesjid Asasi berada di Jurai Sigando nagari gunung Padang Panjang, masjid ini di bangun oleh empat nagari yang ada di jurai

Kelurahan Sigando yaitu Jurai Sigando, Jurai Ekor Lubuk, Jurai Gantiang dan Jurai Ngalau. Kawasan Kampung Sigando dengan potensi cagar budayanya tersebut menjadikan Kampung Sigando ditetapkan sebagai kampung wisata dan religi oleh pemerintah pada tahun 2018 (Zulfikri, 2022).

Bermodal keunggulan dalam bidang wisata religi tersebut, maka wajar saja jika pariwisata tersebut diproyeksikan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian di atas, menurut survey dan wawancara yang dilakukan di lapangan didapat bahwa Kelurahan Sigando sebagai wisata religi namun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan juga daya tarik yang diterima justru belum memberikan pengalaman spiritual bagi pengunjungnya. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas masyarakat yang masih menggiring anjing, bermain kartu ketika di kedai dan tidak adanya *tour guide* dan atribut-atribut lain yang mendukung adanya wisata religi di daerah tersebut. Padahal di kampung tersebut terdapat sebuah masjid asasi yang menjadi cagar budaya yang mana dulunya merupakan tempat untuk menyuarakan penyebaran agama Islam.

Sikap masyarakat tersebut diasumsikan sebagai bentuk perlawanan mereka dalam menerima pelabelan Kampung Wisata Budaya dan Religi. Peneliti menemukan adanya konflik yang terjadi ditengah masyarakat terhadap pelabelan tersebut. Pemerintah seperti memaksakan pelabelan tersebut untuk meningkatkan pengunjung yang meningkatkan pendapatan per kapita daerah karena menjadikan ini menjadi sebuah industri yang hanya mementingkan aspek ekonomi saja namun mengindahkan aspek sosial. Hal ini bisa dikatakan adanya pengaruh relasi kuasa yang menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan akses yang tidak proposional oleh masyarakat karena lebih mendominasi dalam menggunakan wilayah tersebut.

## **METODE**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail data yang diteliti.

Penelitian ini merujuk pada pendekatan analisis kritis institusi. Penelitian ini akan menganalisis peran-peran institusi-institusi terkait, seperti pemerintah lokal, lembaga budaya, dan sektor pariwisata, untuk memahami bagaimana kekuasaan direproduksi dan digunakan dalam proses penetapan Kelurahan Sigando sebagai “Kampung Budaya dan Religi”. penelitian akan melibatkan studi mendalam tentang dinamika kekuasaan di tingkat lokal, termasuk hubungan antara pemerintah daerah, elit lokal, dan komunitas setempat dalam menetapkan kebijakan terkait dengan status Kelurahan Sigando sebagai destinasi pariwisata dan budaya. Pendekatan partisipasi masyarakat akan mengeksplorasi sejauh mana partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses penetapan Kelurahan Sigando sebagai “Kampung Budaya dan Religi”, serta dampaknya terhadap pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian akan memperlihatkan aspek budaya dan religi dalam dinamika kekuasaan, dengan menganalisis bagaimana narasi budaya dan agama digunakan atau dimanfaatkan dalam proses penetapan Kelurahan Sigando sebagai tujuan pariwisata. Evaluasi dampak sosial dan lingkungan akan mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari penetapan Kelurahan Sigando sebagai “Kampung Budaya dan Religi”, termasuk perubahan pola dalam penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan interaksi sosial di komunitas lokal. Mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang relasi kuasa dalam konteks penetapan Kelurahan Sigando sebagai “Kampung Budaya dan Religi” serta memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penetapan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata Religi dan Budaya**

Berdasarkan komponen kriteria wisata religi, peneliti menyimpulkan bahwa Kelurahan Sigando, sebagai Kampung Wisata Religi dan Budaya, telah memenuhi beberapa aspek dari komponen desa wisata. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Wisata religi memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius seseorang. Oleh karena itu,

wisata religi dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan wisata yang bermotif spiritual, yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Suatu daerah yang menjadi tujuan wisata dapat dikategorikan sebagai destinasi yang baik apabila menarik minat pengunjung dan memenuhi tiga kriteria utama:

### **1. Something to See (Sesuatu yang Bisa Dilihat)**

Objek wisata harus memiliki daya tarik khusus yang dapat dilihat dan dinikmati oleh pengunjung. Kampung Wisata Religi dan Budaya Sigando memiliki beberapa spot yang dapat dikunjungi wisatawan, seperti cagar budaya dengan nilai historis dan kolam yang memiliki mitos tersendiri di masyarakat. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa atraksi wisata yang dapat dilihat oleh wisatawan, dengan tarif yang disesuaikan dengan jenis atraksi yang ingin disaksikan. Atraksi wisata ini akan dipertunjukkan oleh sanggar tari di Padang Panjang yang bekerja sama dengan pemerintah.

### **2. Something to Do (Sesuatu yang Bisa Dilakukan)**

Wisatawan diharapkan dapat melakukan berbagai kegiatan rekreasi yang menyenangkan, seperti menikmati fasilitas bermain atau tempat makan dengan makanan khas daerah. Di Kampung Wisata Religi dan Budaya Kelurahan Sigando, fasilitas ini terdaftar di website Jaringan Desa Wisata (Jadesta), program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengelola promosi desa wisata di seluruh Indonesia. Website ini menyediakan informasi mengenai profil kampung, fasilitas, atraksi, homestay, paket wisata, dan souvenir yang tersedia di Kampung Wisata.

### **3. Something to Buy (Sesuatu yang Bisa Dibeli)**

Fasilitas belanja bagi wisatawan, terutama yang menawarkan produk khas daerah, adalah hal yang penting. Kampung Wisata Religi dan Budaya Kelurahan Sigando, yang terdaftar di website Jadesta, menyediakan beberapa souvenir sebagai oleh-oleh bagi wisatawan.

Peneliti menganalisis bahwa Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata Religi dan Budaya masih perlu memperbaiki banyak aspek, terutama dalam hal daya tarik wisata. Misalnya, cagar budaya Masjid Asasi memiliki potensi yang dapat digali lebih dalam. Program-program yang disiapkan oleh pemerintah dinilai belum diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan survei lapangan, peneliti menemukan bahwa belum ada tempat penjualan souvenir atau makanan tradisional, yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. UMKM seperti Yuza Farm dan Batik Asasi seharusnya menjadi komoditas utama untuk dijadikan oleh-oleh wisatawan. Jika pemerintah turut mengembangkan usaha-usaha ini, maka dampaknya akan positif baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Namun, berdasarkan wawancara dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), UMKM ini belum mendapat perhatian dari pemerintah.

Selain itu, kreativitas lain seperti storytelling tentang sejarah Masjid Asasi dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Ulasan di Google Maps dari seorang pengunjung yang menyebutkan "tidak ada yang menarik, hanya masjid saja" menunjukkan perlunya inovasi tambahan. Kehadiran booth merchandise dan makanan tradisional bisa menjadi daya tarik tambahan, serta penyediaan pemandu wisata yang akan membantu pengunjung lebih memahami situs-situs yang ada.

Peneliti juga menemukan bahwa pengelolaan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata Religi dan Budaya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal implementasi program pemerintah yang belum terlaksana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan desa wisata. Namun, peneliti melihat bahwa pemberdayaan dan sosialisasi dari pemerintah masih kurang efektif.

Dalam pengelolaan dan pengembangan kampung wisata, peran serta masyarakat sangat penting. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan mempercepat perkembangan kampung wisata. Selain itu, pemberian fasilitas yang memadai juga menjadi kunci. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar pengembangan Kampung Wisata Religi dan Budaya Kelurahan Sigando dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.



**Gambar 1.** Suasana di Depan Masjid Asasi Sigando (Dok. Rahmatika, 2024)

### **Pengelolaan Kampung Wisata di Daerah Otonom**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini, daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang dianggap penting bagi wilayahnya, asalkan tidak mencakup urusan yang sudah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan tingkat yang lebih tinggi.

Fandeli (1995) mendefinisikan pengelolaan wisata sebagai upaya memanfaatkan tempat atau objek wisata dengan cara mengatur, membina, dan memelihara objek tersebut, serta mengatur dan mengawasi pengunjung melalui organisasi pengelola yang ada. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi pengelolaan wisata ini meliputi: 1) pemanfaatan tempat atau objek wisata; 2) pengaturan, pembinaan, dan pemeliharaan objek wisata; 3) pengaturan dan pengawasan pengunjung; serta 4) organisasi pengelola objek wisata. Pemanfaatan ini berkaitan dengan upaya mengoptimalkan objek wisata potensial agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk wisatawan, pemerintah daerah, komunitas sadar wisata, komunitas lokal, dan pelaku usaha swasta.

Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kota Padang Panjang sebagai pengelola memanfaatkan objek wisata tersebut secara ekonomis untuk meningkatkan nilai tambah, atau yang disebut dengan "added value". Ini berarti upaya yang dilakukan adalah untuk secara kreatif mengubah potensi wisata menjadi industri pariwisata yang memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan. Menurut Sukamadi (2016), industri pariwisata mencakup seluruh usaha yang memungkinkan wisatawan menikmati kunjungan mereka, mulai dari proses awal ketertarikan hingga perjalanan pulang ke rumah.

Sebagai pemangku kepentingan, pemerintah juga berperan dalam menjaga, mengawasi, dan memulihkan eksistensi serta keindahan yang dimiliki objek wisata. Pemerintah, sebagai pembina dan pengawas, bertanggung jawab dalam pembinaan pengelolaan desa wisata, termasuk di Kelurahan Sigando, yang meliputi pengelolaan destinasi, homestay, serta manajemen dan kulinernya. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan berbagai acara yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kerja sama dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas terkait. Dalam kaitannya dengan manfaat ekonomi, pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi, baik bagi industri wisata, menciptakan lapangan kerja bagi komunitas lokal, maupun meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Dengan demikian, kegiatan pariwisata membawa manfaat bagi perkembangan unit usaha lokal yang menyediakan barang dan jasa, menciptakan peluang kerja bagi komunitas lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan desa wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan

nilai tambah yang berkelanjutan, pengelolaan objek wisata potensial di daerah otonom memerlukan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) Kota Padang Panjang 2021-2025, yang meliputi pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, serta pembangunan kepariwisataan mengenai pariwisata halal dan pariwisata berbasis masyarakat, Kelurahan Sigando ditetapkan sebagai salah satu objek wisata yang dikembangkan sebagai pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal menekankan bahwa pembangunan pariwisata di Sumatera Barat harus dilakukan dengan menggali potensi budaya dan adat setempat yang berlandaskan pada filosofi "adat basandi syarak', syarak' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai". Filosofi inilah yang mendasari penetapan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata Religi dan Budaya, terutama karena adanya Masjid Asasi.

### **Bentuk Relasi Kuasa dalam Penetapan Kampung Wisata**

Seperti yang telah dijelaskan, pengelolaan potensi wisata secara optimal melalui kegiatan wisata diperlukan agar potensi wisata dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat dapat diwujudkan melalui pariwisata, yang memiliki kemampuan untuk melindungi sumber daya alam dan budaya. Untuk merealisasikan gagasan pariwisata berbasis masyarakat yang diusung oleh pemerintah Padang Panjang, masyarakat Kelurahan Sigando harus turut mengelola potensi kampung wisata tersebut.

Namun, meskipun Kelurahan Sigando telah ditetapkan sebagai kampung wisata, pengembangan industri pariwisata di sana belum dikelola dengan baik. Melalui survei dan wawancara, peneliti berpendapat bahwa ada intervensi dari pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Sigando terkait pelabelan "kampung wisata". Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kampung Wisata Budaya dan Religi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah. Intervensi ini dapat diartikan sebagai campur tangan atau keterlibatan dalam urusan tertentu. Dalam konteks ekonomi, intervensi pemerintah dapat berupa peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter, yang bertujuan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar.

Pelabelan "kampung wisata" yang diberikan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan keuangan daerah. Namun, pelabelan ini juga menuntut masyarakat untuk bertanggung jawab atas status tersebut. Oleh karena itu, inti dari relasi kuasa yang terjadi dalam penetapan Kelurahan Sigando sebagai Kampung Wisata Religi dan Budaya adalah adanya legitimasi pemerintah.

### **Konflik yang Terjadi di Tengah Masyarakat**

Peneliti menemukan adanya tumpang tindih antara kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini terlihat ketika masyarakat mengajukan permohonan atau pelabelan nama kepada pemerintah. Pada awalnya, masyarakat Kelurahan Sigando mengajukan permohonan kepada pemerintah agar wilayah mereka dikenal sebagai "Kampung Budaya," dengan harapan kelurahan tersebut diakui karena kekayaan budayanya yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok sadar wisata (pokdarwis), peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan pelabelan "desa wisata," karena menurut mereka, desa yang dapat disebut sebagai "desa wisata" adalah Kubu Gadang. Mereka merasa konsep tersebut tidak sesuai dengan karakteristik Sigando, sehingga mereka mengajukan nama "Kampung Budaya dan Religi" kepada pemerintah. Namun, pemerintah justru mengesahkan nama "Kampung Wisata Religi dan Budaya," yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Penamaan Kelurahan Sigando sebagai "Kampung Wisata Religi dan Budaya" ini memicu konflik dan ketegangan di masyarakat. Konflik ini mencerminkan ketegangan antar kelas, yaitu antara pemerintah dan masyarakat Kelurahan Sigando.

### **Bentuk Konflik**

Konflik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konflik tertutup (laten) dan konflik terbuka (manifest). Dalam konteks masyarakat Kelurahan Sigando terkait pelabelan Kampung Wisata, konflik ini lebih cenderung termasuk dalam kategori konflik tertutup (laten). Berdasarkan

wawancara, bahkan di kalangan ulama pun terdapat ketidaksetujuan terhadap pelabelan ini, karena perilaku dan kebiasaan masyarakat Sigando tidak mencerminkan karakteristik sebuah kampung religi, apalagi jika harus dijadikan sebagai kampung wisata. Selain itu, dalam proses perumusan kegiatan atau peluncuran program di Kelurahan Sigando, tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan, melainkan hanya segelintir orang tertentu saja. Program-program yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut belum dipertimbangkan apakah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau apakah ada program lain yang lebih dibutuhkan.

Dalam hal pelabelan Kelurahan Sigando sebagai "kampung wisata," baik masyarakat maupun pemerintah seharusnya bekerja sama dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kampung wisata. Salah satu bentuk protes masyarakat adalah keluhan tentang kurangnya pelibatan mereka dalam festival atau acara yang diadakan di kampung wisata tersebut. Mereka merasa diabaikan karena kurangnya informasi mengenai acara-acara tersebut. Pemerintah juga dinilai kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang seharusnya bisa meningkatkan perekonomian mereka. Pemerintah dianggap tidak mendukung UMKM di Kelurahan Sigando karena tidak mengikutsertakan masyarakat dalam event-event yang seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan usaha mereka. Secara keseluruhan, konflik ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari ketidaksetujuan yang samar hingga menimbulkan kesalahpahaman. Ketika terjadi konflik, diharapkan hal ini dapat membantu memperjelas hal-hal yang sebelumnya kurang jelas atau menimbulkan penafsiran yang salah, akibat adanya perbedaan pemahaman dan pendapat.

## **KESIMPULAN**

Konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat Sigando mencerminkan adanya tumpang tindih kepentingan antara politik, budaya, dan keagamaan. Masyarakat awalnya mengusulkan pelabelan yang lebih sesuai dengan identitas budaya mereka sebagai "Kampung Budaya," namun pemerintah memilih untuk menetapkan wilayah tersebut dengan label yang mencakup juga aspek religi. Konflik ini terutama bersifat laten, di mana ketidakpuasan masyarakat tidak diungkapkan secara terbuka tetapi dirasakan secara mendalam, terutama ketika keputusan pemerintah dianggap tidak sejalan dengan aspirasi lokal. Ketidaksepakatan ini menunjukkan adanya ketegangan kelas antara pemerintah dan masyarakat, yang jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar.

Relasi kuasa yang terjadi juga menggambarkan bagaimana pemerintah daerah, sebagai pengelola daerah otonom, memiliki wewenang untuk menentukan arah pengembangan wisata, yang secara ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, langkah ini tidak selalu memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat setempat, yang merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan wisata, serta kurang dilibatkan dalam program-program yang diluncurkan.

Dengan demikian, konflik yang muncul bukan hanya sekadar ketidaksepakatan mengenai pelabelan, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih dalam antara pemerintah dan masyarakat, di mana keputusan-keputusan yang diambil lebih mengedepankan kepentingan ekonomi daerah daripada kesejahteraan dan keterlibatan masyarakat lokal. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketegangan antara kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat Kelurahan Sigando dalam penetapan dan pengelolaan "Kampung Wisata Religi dan Budaya." Masyarakat awalnya menginginkan wilayah mereka diakui sebagai "Kampung Budaya," mencerminkan tradisi dan budaya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, pemerintah memilih untuk menetapkan Kelurahan Sigando sebagai "Kampung Wisata Religi dan Budaya," yang berbeda dari harapan masyarakat setempat.

Penelitian ini menyoroti perlunya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Partisipasi yang lebih inklusif dan dialog terbuka dapat membantu mengurangi konflik dan memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kelurahan Sigando memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- Adetiya Prananda Putra dkk. (2017). Analisis Dampak Berganda (Umultipler Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Bayuwangi, *Journal Of TOURISM AND CREATIVITY*. Volume 1, nomor 2, Juli hal 141-154
- Bahari, Yohanes. (2010). Karl Marx : Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* Vol. 1. No. 1. April 2010.
- Fandeli, Chafid. (1995). Potensi Objek Wisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar- Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Josephin Wuri, Rini Hardanti, Bambang Harnoto. (2015). Dampak Keberadaan Kampung Wisata Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat. *Jurnal Penelitian*. Volume 18, No. 2, Mei 2015.
- Kamaruddin , Salim dan Efriza (2022). *Sosiologi Kekuasaan Teori dan Perkembangan*. PT. Bumi Aksara.
- Kebung, Kondrad (2017), *Membaca 'Kuasai' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia*. *Jurnal Melintas* Volume 33.1.
- Koentjaraningrat. (1982). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kusnadi dan Baharuddin. (1997). *Anatomi Konflik Sosial dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Maryanti Kun, Juju Suryatu. (2001). *Sosiologi SMA*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Foucault, Michel. (2002). *Power and Knowledge Wacana Kuasa dan Pengetahuan*. Jogjakarta: PT. Benteng Budaya. Terjemahan Yudi Santosa.
- Noni , Ahlavun Nisvi (2021), *Analisis Konsep 3A (Atraksi, Amenitas Dan Aksebilitas) Dalam Pengembangan Wisata Religi Makam Ki Ageng Tarub Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobongan*. Skripsi Universitas Islam Negri WaliSongo.
- Novaria, R., & Rohimah, A. (2017). *Pengembangan Community Based Tourism sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan pemasaran pariwisata di Wonosalam Kabupaten Jombang*. 20.
- Nuryanti, Wiendu. (1995). Perencanaan Pembangunan Regional dan Kawasan Untuk Kepariwisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata alm*. Yogyakarta: Liberty.
- Oakley, Peter, et al. (1991). *Projec with people, The Practice of Participation in Rual Development , International Labour Office, Geneva*.
- Paharizal. (2021). Interrelasi Masyarakat Lokal Dengan Cagar Budaya. *Jurnal POPULIKA* Vol. 9 No. 1 Tahun 2021
- Rifqy , Ilham Darwis. (2021). *Analisis Dampak Kegiatan Pariwisata Di Masjid Asasi Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Sigando Sumatra Barat*. Skripsi Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta .
- Saiful , Fachri. (2018). *Objek Wisata Religi: Potensi dan Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Lokal ( Studi Kasus pada Makam Syekh Mansyur Cikadeun Pandeglang*. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*.
- Sianturi, S.R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
- Sudarman. (2014). *Fenomenologi Husserl Sebagai Metode Filsafat Eksistensial*. Al-AdYaN/Vol.IX, N0.2/Juli-Desember/2014.
- Zulfikri , Budiwirman. (2022). *Identitas Visual Kampung Budaya Religi Sigando Padang Panjang*. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, No. 2, h. 1-14.